

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG BERDAYA SAING TINGGI

Gumilang Hardjakoesoema

Kedeputian Sarana dan Prasarana
20 November 2014

Capaian Pembangunan Sektor 2010 - 2014

Keterangan

MENGURANGI *BLANK SPOTS*

- Jangkauan layanan telekomunikasi dan internet di wilayah USO
- Jangkauan siaran LPP terhadap populasi (TVRI dan RRI)

2009	2013	Target 2014
------	------	-------------

78% (USO telepon) 2% (USO internet)	99,2% (Desa Dering) 103,6% (PLIK)	100%
--	--------------------------------------	------

Secara fisik terpenuhi, manfaat?

62% (TVRI)* 83% (RRI)*	68% (TVRI) 70% (RRI)	88%
---------------------------	-------------------------	-----

Perlu revitalisasi LPP secara menyeluruh termasuk kelembagaan dan pendanaan

INFRASTRUKTUR MODERN

- Jumlah pulau besar yang terhubung jaringan tulang punggung nasional serat optik
- Jumlah kab/kota dilayani *broadband*
- Tingkat penetrasi TV digital

2 pulau belum terjangkau	2 pulau belum terjangkau	100%
--------------------------	--------------------------	------

Bertumpu pada PT Telkom. Pembangunan oleh Pemerintah (Kominfo) menunggu redesign USO

63% *	72%	88%
-------	-----	-----

Belum operasional secara luas, menunggu RUU Penyiaran?

0%	60%	35%
----	-----	-----

INFORMASI PUBLIK *ONLINE*

- Indeks *e-Government*

1,9 (kurang)	2,6-2,7 (kurang)	3,4 (baik)
--------------	------------------	------------

Belum ada Masterplan e-Government yang menjadi acuan sehingga saat ini e-gov nasional belum terpadu

K/L : 2,67
Prov: 2,59
Kab/kota: 2,69

* Angka 2010

Trisakti: Visi dan Platform Perubahan

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong



Menghadirkan Negara yang Bekerja



1. **Pemenuhan hak warga** untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi (Pasal 28F UUD 1945)
2. Menjaga **“kedaulatan informasi”** terutama di wilayah perbatasan negara
3. Penguatan ***back office* pemerintah** untuk menguatkan konektivitas antar instansi pemerintah dan mendukung pelayanan publik yang lebih baik

Kemandirian yang Mensejahterakan



Pembangunan **jalan tol informasi** untuk mendukung transformasi perekonomian nasional

Revolusi Mental



Pemanfaatan TIK secara optimal dan bijak untuk mendukung peningkatan daya saing nasional dan kualitas hidup masyarakat Indonesia

Sasaran Pembangunan TIK 2015-2019

Isu	Sasaran Utama	Rincian Sasaran
<p>1</p> <p>Penyediaan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah non-komersial dan perbatasan negara sebagai pemenuhan amanah Pasal 28F UUD 1945</p>	<p>Berkurangnya <i>blank spot</i> layanan komunikasi dan informatika</p>	<ul style="list-style-type: none">a. Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah USOb. Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi masing-masing mencapai 90% dan 88%

Sasaran Pembangunan TIK 2015-2019

(lanjutan)

Isu	Sasaran Utama	Rincian Sasaran
<p>2</p> <p>Pembangunan jalan tol informasi untuk mendukung transformasi perekonomian Indonesia</p>	<p>Dibangunnya akses internet berkecepatan tinggi (pitalebar/<i>broadband</i>) dengan jaminan ketahanan dan keamanan informasinya</p> <p>Optimalnya pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit</p>	<ul style="list-style-type: none">a. Terhubungnya jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh pulau besar dan kabupaten/kotab. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di perkotaan mencapai 71% rumah tangga dan 30% populasi, di perdesaan 49% rumah tangga dan 6% populasic. Tingkat penetrasi akses bergerak pitalebar (<i>mobile broadband</i>) dengan kecepatan 1 Mbps di perkotaan mencapai 100% dan perdesaan 52% <ul style="list-style-type: none">a. Migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital selesai (<i>analog switch off</i>)b. Tersedianya alokasi spektrum frekuensi yang mendukung layanan pitalebar

Sasaran Pembangunan TIK 2015-2019

(lanjutan)

Isu	Sasaran Utama	Rincian Sasaran
<p>3</p> <p>Pemanfaatan informasi dan TIK secara produktif dan bijak</p>	<p>Dimanfaatkannya TIK secara optimal untuk mendukung peningkatan daya saing nasional dan kualitas hidup masyarakat Indonesia</p>	<p>Tingkat literasi TIK mencapai 75%</p>
<p>4</p> <p>Pengintegrasian sistem komunikasi dan informatika instansi pemerintah untuk mendukung pemerintahan yang efisien dan pengelolaan data pemerintah sebagai aset strategis</p>	<p>Terwujudnya sistem <i>back office</i> pemerintah yang lebih solid dan efisien</p>	<ul style="list-style-type: none">a. Indeks <i>e-government</i> nasional mencapai 3,4 (skala 4,0)b. Jumlah pegawai pemerintah yang paham TIK menjadi 100%

1	Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau <i>Universal Service Obligation</i> (USO) menjadi berorientasi pitalebar
2	Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas
3	Mendorong pembangunan akses tetap pitalebar
4	Membangun prasarana pitalebar di daerah perbatasan negara
5	Memberikan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan
6	Mempercepat implementasi <i>e-Government</i> dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan <i>cost effective</i>
7	Pemerintah sebagai fasilitator yang mendorong penggunaan pitalebar
8	Mendorong tingkat literasi TIK
9	Mendorong kemandirian dan daya saing industri TIK dalam negeri
10	Merestrukturisasi sektor penyiaran



KONSEP PENDANAAN PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2015- 2019



Instrumen Intervensi Pemerintah

**KERANGKA REGULASI
MENDORONG PERAN SWASTA**



SWASTA

**PENINGKATAN KUALITAS
BELANJA PUBLIK**



PEMERINTAH

PUSAT

DAERAH

**KERANGKA REGULASI
MENDORONG KPS**



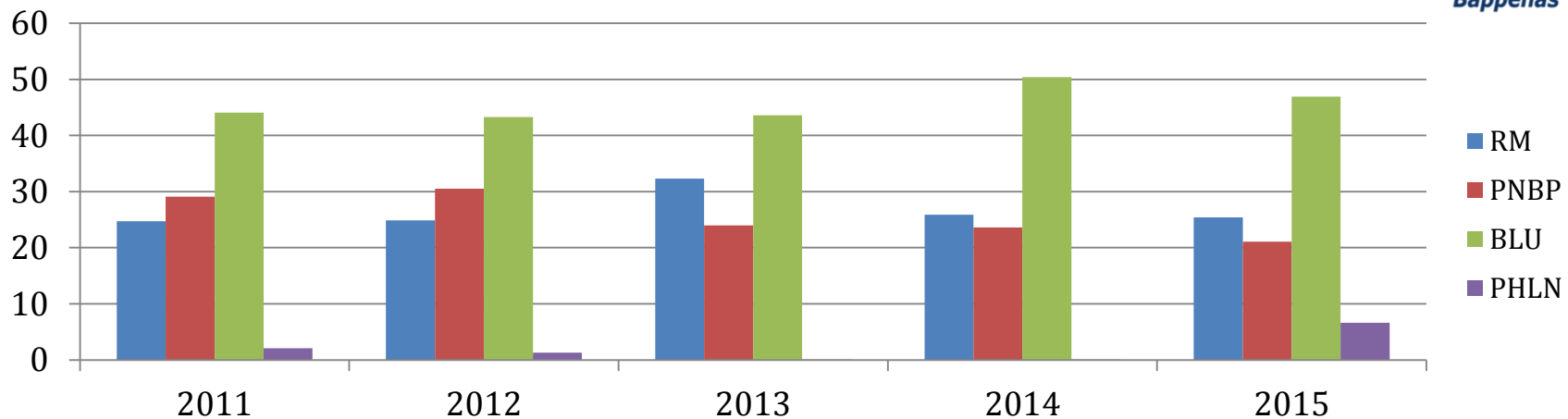
**KERJASAMA PEMERINTAH
SWASTA**

PEMERINTAH

SWASTA

**KEBUTUHAN PENDANAAN
PRIORITAS NASIONAL**

Anggaran Kementerian Kominfo 2011-2015



	2011	2012	2013	2014	2015
	3.307.551,5	3.463.996,4	3.433.646,7	3.573.626,9	4.756.246,9
RM	24,7%	24,9%	32,3%	25,9%	25,4%
PNBP	29,1%	30,5%	24,0%	23,6%	21,1%
BLU	44,1%	43,3%	43,6%	50,4%	46,9%
PLN	2,1%	1,3%	0,1%	0,1%	6,6%

Dalam juta Rupiah. 2011-2014 Pagu Indikatif. 2015 Pagu Anggaran

- 30%-35% dari Rupiah Murni digunakan untuk belanja rutin (pegawai dan barang operasional). Di tahun 2015 mencapai 57%.
- BAPPENAS tidak terlibat dalam pengelolaan Dana USO. Dalam proses RKP dan Pagu Indikatif RAPBN, *exercise* pengalokasian Dana USO sebagai PNBP BLU dilakukan oleh Kemkeu berkoordinasi dengan Kemkominfo.

Strategi Pendanaan Sektor TIK

OPTIMALISASI PEMANFAATAN APBN

- Transformasi pengelolaan dan penggunaan Dana USO menjadi *broadband-ready* yang berorientasi pengembangan ekosistem termasuk aplikasi dan *capacity building*.
- Optimalisasi penggunaan BHP Frekuensi terutama untuk pengembangan *mobile broadband*.
- Model bisnis yang lebih efektif dan efisien (tidak terpaku kepada belanja modal) dengan memperhatikan mitigasi risiko dan keberlanjutan.
- Mendorong pergeseran pola belanja modal (*capex*) menjadi belanja operasional (*opex*).
- Pembentukan *ICT Fund* yang bersifat jangka panjang.

EFISIENSI PEMANFAATAN APBN

- Implementasi *infrastructure sharing* misal: pembangunan pusat data *e-government* secara terpadu; pembangunan *duct* umum yang dapat digunakan untuk berbagai infrastruktur (kabel listrik, telepon, dsb); penggunaan *right of way* infrastruktur lain seperti tiang listrik, jalan tol.
- Sinkronisasi APBN Kementerian/Lembaga untuk belanja TIK guna menghindari duplikasi.

MOBILISASI DANA DI LUAR APBN

- Implementasi Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). APBN digunakan sebagai Dukungan Pemerintah untuk meningkatkan kelayakan proyek.
- Menciptakan kondisi investasi dan berusaha yang kondusif dengan menekan *regulatory cost* yang disebabkan antara lain oleh tidak konsisten dan tidak harmonisnya berbagai peraturan termasuk peraturan daerah.

Perkiraan Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur 2015-2019

Sasaran Utama	Rincian
Menutup <i>blank spot</i>	<ul style="list-style-type: none">Proyek USO (hasil redesain)
Percepatan pembangunan infrastruktur pitalebar	<ul style="list-style-type: none">Palapa RingFasilitasi pembangunan jaringan pitalebar di infrastruktur strategis nasional (pelabuhan, bandara) dan sekolah
Pengelolaan spektrum dan orbit satelit	<ul style="list-style-type: none">Percepatan penataan spektrum (BHP Frekuensi sebagai insentif)Pembangunan satelit nasional
Literasi TIK	<ul style="list-style-type: none">Kegiatan pemberdayaan masyarakat
e-Gov	<ul style="list-style-type: none">Pusat data pemerintah yang terkonsolidasiJaringan komunikasi pemerintah



PENUTUP



- Sesuai dengan tema RPJMN 2015-2019 yang menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian, pembangunan komunikasi dan informatika lima tahun ke depan juga harus diarahkan untuk mencapai hal tersebut.
- Walaupun pembangunan infrastruktur TIK yang berdaya saing akan menjadi fokus, pemberdayaan masyarakat melalui TIK juga harus dilakukan. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk pengelolaan bonus demografi dan agar penggunaan TIK menjadi lebih produktif dan bijak.
- Untuk mendorong pembangunan infrastruktur TIK yang berdaya saing, Pemerintah dapat menggunakan intervensi regulasi dan/atau pendanaan. Penentuan instrumen intervensi yang digunakan hendaknya sudah melalui kajian sehingga dapat berjalan efektif dengan pengalokasian anggaran yang efisien.
- Pemerintah diharapkan dapat menjadi katalisator yang memberikan stimulan tanpa mengambil alih atau bersaing dengan penyelenggara. Pendekatan *multi-stakeholder* menjadi penting. Koordinasi lintas Kementerian dan dengan Pemerintah Daerah menjadi keharusan.



TERIMA KASIH

